

PENTAKOSTALISME[†]

(Kelindan Antara Politik Emosi, Populisme, dan Komunitarianisme)

Abstrak

Sudah sejak beberapa tahun terakhir, terutama pasca Ahok menggantikan Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, perpolitikan di Indonesia diwarnai dengan politik yang tidak rasional. Emosi, yang terwujud dalam ekspresi-ekspresi kebencian dan permusuhan, begitu kuat terasa dalam setiap kegiatan politik. Pemilu yang semestinya menjadi pesta demokrasi yang menggembikan, berubah menjadi ajang permusuhan yang tidak jarang memecah belah masyarakat. Politik emosi yang diusung tersebut tidak dapat disangkal dimanfaatkan oleh para politisi populis untuk mewujudkan agendanya. Melalui tulisan ini saya bermaksud untuk menguraikan bangkitnya gerakan populisme dengan karakteristik politik emosinya. Untuk mencapai maksud tersebut, saya mencoba untuk menggunakan pemikiran komunitarian sebagai lensa analisisnya. Disamping itu, saya juga akan merefleksikan analisis tersebut terhadap gerakan Pentakostal atau Pentakostalisme. Kelompok Pentakostal sendiri selama ini diidentikkan sebagai kelompok yang impulsif dan berkembang melalui populisme. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa bangkitnya gerakan populis adalah sebagai bentuk reaksi terhadap individualisme dan meritokrasi yang diusung oleh liberalisme, yang dianggap mengancam sistem nilai dalam komunitas.

Kata Kunci: komunitarianisme; liberalisme; libertarianisme; meritokrasi; pentakostalisme; populisme

Pendahuluan

Politik emosi tidak dapat dipisahkan dari adanya populisme. Populisme itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu wacana politik yang menganggap masyarakat pada intinya terbagi dalam dua kubu homogen dan antagonistik, yaitu antara “rakyat yang bersih” melawan “elit yang korup.”¹ Dalam diskursus tersebut, politik (dianggap) seharusnya merupakan perwujudan dari kehendak rakyat itu. Gerakan populis biasanya dipimpin oleh seorang tokoh karismatik, yang akan mengklaim diri sebagai mewakili kehendak rakyat secara keseluruhan untuk melawan elit yang dianggap telah korup. Orang-orang yang menentang wacana yang diusung oleh gerakan populis tersebut akan dianggap sebagai musuh.

Gerakan populis terlihat sangat kentara pada saat terjadinya Gerakan 212. Dalam peristiwa tersebut dinarasikan sebagai perlawanan “rakyat yang bersih,” yaitu umat Islam

[†] Yushak Soesilo (yushak@sttintheos.ac.id). Sekolah Tinggi Teologi Intheos Surakarta.

¹ Martin van Bruinessen, “Traditionalist Muslims and Populism in Indonesia and Turkey,” *Tashwirul Afkar* 40, no. 2 (December 29, 2021): 1–27, <https://doi.org/10.51716/TA.V40I2.63>.

terhadap “elit yang korup,” yaitu Basuki T. Purnama, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Dinarasikan bahwa Ahok telah melukai perasaan seluruh umat Islam melalui pernyataannya pada saat berpidato di Kepulauan Seribu yang dianggap sebagai penistaan terhadap agama Islam. Gerakan tersebut berjalan semakin masif di bawah komando Imam Besar FPI (sering dinarasikan sebagai Imam Besar Umat Islam) yang karismatik, Habib Rizieq Shihab. Gerakan itu terus berlanjut sampai Pilkada DKI Jakarta 2017, yang membuat masyarakat DKI Jakarta (bahkan Indonesia) terpolarisasi dengan begitu tajam. Permusuhan dan kebencian begitu terasa mewarnai tahapan Pilkada, yang semestinya menjadi pesta demokrasi. Ancaman pengkafiran terang-terangan disuarakan bagi umat Islam yang mendukung Ahok. Demokrasi sudah menjadi tidak sehat lagi karena pilihan bukan lagi berdasarkan akal sehat, namun lebih kepada emosi.

Nastiti dan Ratri menganalisis fenomena populisme dalam Pilkada DKI Jakarta tersebut dan menyebutkan bahwa politik emosi menjadi mekanisme bagi kelompok Islam untuk memobilisasi dukungan.² Isu moral-agama biasanya dimanfaatkan beriringan dengan isu-isu populer, seperti kemiskinan, korupsi, hukum, dsb, untuk semakin menguatkan ikatan emosional dengan para konstituennya. Apabila Nastiti dan Ratri menganalisis politik emosi dengan pendekatan patronase, maka dalam tulisan ini saya akan mencoba mendalami politik emosi tersebut dengan melihatnya dari kacamata pemikiran komunitarian. Menurut saya, gerakan populis yang menggunakan mekanisme politik emosi adalah suatu bentuk perlawanan komunitas terhadap terhadap individualisme dan sekularisasi dalam liberalisme. Oleh karena itu, untuk menganalisisnya saya akan menguraikan terlebih dahulu kritik komunitarian terhadap liberalisme dan melihat bagaimana itu semua terjadi dalam perpolitikan di Indonesia. Selanjutnya saya juga akan menguraikan gerakan populisme di dalam tubuh kekristenan yang diwakili oleh kelompok Pentakostal.

Kritik Komunitarianisme terhadap Liberalisme

Paham komunitarianisme lahir sebagai kritik terhadap paham liberalisme yang diusung oleh tokoh-tokohnya, antara lain: John Rawls, Donald Dworkin, dan Robert Nozick. Sebenarnya tidak semua gagasan liberalisme, terutama tentang kebebasan individu dan egalitarian, ditolak oleh komunitarianisme. Yang paling dikritik oleh komunitarianisme adalah pandangan liberalisme yang terlalu menekankan individu-individu yang seolah terlepas dari masyarakatnya. Atomisasi individu ini mengabaikan realitas bahwa manusia tidak pernah

² Aulia Nastiti and Sari Ratri, “Emotive Politics: Islamic Organizations and Religious Mobilization in Indonesia,” *Contemporary Southeast Asia* 40, no. 2 (2018): 196–221, <https://doi.org/10.1355/cs40-2b>.

terlepas dari masyarakat di mana ia hidup, yang kemudian mempengaruhi bahkan menentukan jalan hidupnya. Gagasan liberalisme tersebut oleh komunitarianisme dianggap gagasan yang terlalu imajinatif dan hipotetik, di mana individu-individu dibayangkan seolah-olah melayang-layang di ruang hampa.

John Rawls menyampaikan teorinya tentang keadilan, yang kemudian menggundang tanggapan dari kelompok komunitarian, dalam bukunya yang berjudul "*A Theory of Justice*."³ Keadilan dalam paham liberalisme adalah keadilan yang lebih bersifat prosedural ketimbang substantif. Keadilan adalah dalam pengertian *fairness*, yang pada intinya bahwa setiap orang berhak untuk mencapai sesuatu sepadan dengan usahanya. Adalah adil bahwa seseorang menjadi kaya oleh karena kerja kerasnya, meskipun di satu sisi ada orang yang miskin. Setiap orang layak untuk mendapatkan penghargaan lebih daripada yang lainnya sesuai dengan prestasi yang dicapainya.

Namun, Rawls juga menyadari bahwa tidak sepenuhnya prestasi atau ketidakberuntungan seseorang adalah semata-mata karena pilihan hidupnya. Seseorang yang mendapatkan keuntungan besar karena menjadi pesepakbola terkenal, perlu diakui hal itu tidak semata karena kerja kerasnya dalam berlatih, namun juga ada faktor bakat. Demikian juga, ada orang yang miskin, bukan karena pilihan hidupnya, tetapi misalnya karena sakit atau cacat. Dalam hal ini, prinsip meritokrasi tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan diperlukan suatu prinsip yang dapat menuju pada apa yang disebut dengan "*fair meritocracy*."⁴ Oleh karena itu, Rawls menawarkan konsepnya tentang keadilan melalui prinsip "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).

Posisi asali adalah posisi yang dibayangkan ketika seseorang hidup tanpa negara, di mana orang-orang yang bebas dan setara berdiskusi untuk menentukan tatanan hidup bersama.⁵ Karakter posisi asali dihipotesiskan sebagai karakter yang ideal dan memiliki pemahaman akan keadilan yang murni, tanpa dipengaruhi oleh kebaikan tertentu yang ada ketika individu berada di tengah masyarakat, yang dapat mengakibatkan pemahaman akan keadilan menjadi subjektif. Dengan demikian, Rawls sedang membayangkan adanya keadilan yang akan bersifat universal, yang bisa diterapkan di semua tempat. Dalam posisi asali tersebut, individu mengambil keputusan berdasarkan selubung ketidaktahuan, yaitu bahwa mereka tidak mengetahui

³ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised (Massachusetts: The Belknap Press, 1999).

⁴ Michael J. Sandel, *Liberalism and the Limits of Justice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 68.

⁵ Otto Gusti Madung, "Krisis Demokrasi Dan Tirani Meritokrasi Menurut Michael Sandel," *Jurnal Ledalero* 19, no. 2 (December 19, 2020): 127–44, <https://doi.org/10.31385/JL.V19I2.212.127-144>.

bagaimana posisi sosial mereka di masa depan.⁶ Dengan tidak mengetahui posisi di masa depan, maka keputusan akan diambil berdasarkan apa yang menguntungkan bagi pihak yang paling tidak beruntung.

Untuk dapat mewujudkan prinsip keadilan tersebut, maka ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, dan peluang yang sama harus diberikan kepada semua orang.⁷ Keadilan tidak selalu berarti semua orang harus mendapatkan bagian yang sama. Oleh karena itu, redistribusi harus dilakukan, di mana orang-orang yang dalam keadaan tidak beruntung mendapatkan manfaat dari orang yang dalam keadaan beruntung. Sekali lagi pertimbangannya adalah keberuntungan (misal: bakat) dan ketidakberuntungan (misal: sakit, cacat, kecelakaan) bukanlah merupakan pilihan hidup seseorang. Maka, negara dapat menarik pajak yang makin besar (progresif) kepada orang kaya demi dapat memberikan layanan asuransi kesehatan bagi warga negaranya yang dalam keadaan tidak beruntung. Itu dinilai tetap adil. Prinsip yang dikemukakan oleh Rawls ini yang kemudian mendasari gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*). Demikian juga, keadilan dapat terwujud apabila setiap orang mendapatkan peluang yang sama untuk menduduki suatu jabatan yang diinginkannya. Setiap orang berpeluang menduduki jabatan yang didambakan selama memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Di sinilah prinsip meritokrasi ditekankan oleh liberalisme.

Pemikiran Rawls ini kemudian dikritik oleh tokoh liberal lainnya, yaitu Robert Nozick. Kedua tokoh tersebut memang berasal dari aliran liberalisme, namun dalam mazhab yang berbeda. Rawls, karena pemikirannya, lebih dikenal dengan liberalisme egalitarian (neo-liberal), sementara Nozick dikenal mewakili pemikiran libertarian. Jika Rawls mendukung campur tangan negara dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, maka sebaliknya, Nozick menolaknya.⁸ Menurut Nozick, individu adalah pemilik dirinya sendiri. Tesis tersebut berimplikasi pada bakat adalah juga dimiliki sendiri oleh individu, dan dengan demikian, apapun yang dihasilkan oleh bakat tersebut adalah menjadi miliknya sendiri.⁹ Dari situ, menurut Nozick, adalah tidak adil ketika sebagian kekayaan individu, dengan berdasarkan asumsi keberuntungan, harus didistribusikan kepada individu lainnya yang dianggap dalam keadaan tidak beruntung agar terwujud kesetaraan sosial. Baginya, tidak masalah ada kesenjangan, selama apa yang dimilikinya tersebut diperoleh secara sah.

⁶ Madung.

⁷ Madung.

⁸ Yesaya Sandang and Eko Wijayanto, "Konstruksi Konsep Hak Robert Nozick Dan John Rawls (Sebuah Komparasi Pemikiran)," *Pax Humana: Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma* 4, no. 1 (2017): 5–26.

⁹ Sandang and Wijayanto.

Oleh karena itu, Nozick menyatakan bahwa peran negara harus seminimal mungkin.¹⁰ Negara hanya berperan untuk melindungi individu dari kekerasan, kejahatan, perampokan, penipuan, dsb. Dengan demikian, negara tidak perlu menggunakan aparatur yang sifatnya koersif dalam rangka memaksa warganya memberikan bantuan kepada yang lainnya, atau melakukan pelarangan atau pembatasan terhadap aktivitas-aktivitas warganya yang mengupayakan kesejahteraan atau keamanan bagi diri mereka sendiri.¹¹ Jadi negara hanya sebatas berperan melindungi hak-hak warganya, dan bukan untuk membatasinya dengan alasan apapun, termasuk demi alasan kesetaraan sebagaimana yang digagas Rawls. Kebebasan individu hanya dibatasi oleh kebebasan individu lainnya. Keadilan yang sesungguhnya, bagi Nozick, terjadi di pasar bebas. Adalah hak tiap individu, sesuai kualifikasinya, untuk mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya, tidak boleh juga ia dikurangi haknya diluar *meritnya*.

Pemikiran-pemikiran liberalisme tersebut mengundang kritik tajam dari kelompok komunitarianisme.¹² Pertama, kaum komunitarian menolak gagasan liberalisme yang membayangkan manusia sebagai individu-individu yang terlepas dari komunitas sosialnya dan ditempatkan dalam ruang-ruang kebebasan. Kedua, melemahnya solidaritas sosial oleh karena atomisasi individu. Dalam hal ini, pemikiran Rawls tentang redistribusi keadilan terlihat kelemahannya. Apa yang menjadi dasar bagi individu yang dalam keadaan beruntung untuk rela berbagi individu lainnya yang tidak beruntung, sementara mereka adalah individu yang terlepas satu sama lainnya? Rasa solidaritas tidak akan terbangun tanpa adanya ikatan komunitas. Dalam liberalisme, solidaritas tersebut telah digantikan oleh rasionalitas pasar. Demikian juga dengan nilai-nilai moral, etis, dan berbagai nilai-nilai komunitas lainnya telah dipinggirkan. Menurut Michael J. Sandel, salah seorang pemikir komunitarian, dibutuhkan basis moral yang kuat bagi individu untuk bersedia membagi apa yang dimilikinya.¹³ Di sinilah peran komunitas yang akan merumuskan bagaimana dan kepada siapa sesuatu itu harus dibagikan.

Faktor lotere alamiah, yang terwujud dalam bakat yang dimiliki, yang menjadi dasar argumentasi Rawls bahwa seseorang dapat dikurangi kepemilikannya juga terasa sangat imajinatif. Bagaimanapun hebatnya bakat yang dimiliki seseorang sehingga membuatnya mendapatkan keuntungan yang besar tidak dapat sama sekali mengabaikan faktor komunitas.

¹⁰ Robert Nozick, *Anarchy, State, and Utopia* (New York: Basic Books, 2013), Preface.

¹¹ Nozick.

¹² Madung, "Krisis Demokrasi Dan Tirani Meritokrasi Menurut Michael Sandel."

¹³ Sandel, *Liberalism and the Limits of Justice*, 28.

Seorang pesepakbola yang sangat berbakat sehingga menjadi kaya raya dari berprofesi sebagai pesepakbola profesional, tidaklah semata-mata karena kerja keras ataupun karena bakatnya. Keberuntungannya adalah karena masyarakat di mana ia berada adalah masyarakat yang memiliki kesenangan yang besar akan sepak bola. Akan lain ceritanya apabila ia hidup di masyarakat yang tidak menyukai sepak bola. Maka yang akan ia lakukan adalah merintis karir di negara yang masyarakatnya menggandrungi sepak bola.

Selain atomisasi individu, yang sangat imajinatif, hipotetik, dan tidak sesuai dengan realitas, pengagungan meritokrasi oleh liberalisme juga menjadi sasaran serangan kaum komunitarian. Meritokrasi menempatkan prestasi individu sebagai ukuran satu-satunya dalam kehidupan sosial.¹⁴ Sandel mengkritik meritokrasi sebagai telah merendahkan dan menghina kaum miskin, karena tesis yang dibangun oleh meritokrasi adalah jelas, bahwa siapa yang miskin adalah salahnya sendiri.¹⁵ Meritokrasi sendiri berkelindan dengan sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi berlaku prinsip siapa yang menghasilkan banyak, dibayar banyak. Sandel mengkritiknya dengan mengajukan pertanyaan: mengapa bankir dibayar lebih tinggi dibandingkan dengan perawat yang meresikokan hidupnya merawat pasien Covid-19?¹⁶ Di sini terlihat jelas bahwa “prestasi” yang dimaksud oleh meritokrasi adalah sebatas penilaian secara ekonomi. Nilai kebaikan yang terkandung dalam dedikasi perawat tersebut, bagi meritokrasi, tidak diperhitungkan sebagai prestasi. Dengan demikian, meritokrasi adalah juga merupakan ideologi, karena tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya.

Pendidikan juga dituding sebagai yang telah berjasa menyuburkan ideologi meritokrasi.¹⁷ Institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi, yang sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk mengenyam pendidikan, kini menjadi lebih bersifat *privilege*. Mitos-mitos pendidikan diciptakan demi menunjukkan bahwa setiap orang bisa mengenyam pendidikan tinggi asalkan mau bekerja keras. Berita yang di-*blow up* sedemikian rupa tentang anak tukang becak lulus *cum laude*, anak tukang *cleaning service* diterima di universitas luar negeri, adalah contoh mitosisasi pendidikan. Sementara dalam realitasnya, berapa banyak anak-anak yang bisa bernasib seperti mereka dibandingkan dengan anak dari keluarga yang mampu?

Komunitarianisme, yang banyak melancarkan serangan terhadap liberalisme, dimengerti sebagai suatu upaya untuk menghidupkan kembali kesadaran hidup secara kolektif

¹⁴ Madung, “Krisis Demokrasi Dan Tirani Meritokrasi Menurut Michael Sandel.”

¹⁵ Madung.

¹⁶ Madung.

¹⁷ Madung.

atau hidup dalam komunitas.¹⁸ Jika liberalisme menekankan pada kebebasan individu, komunitarianisme menyadarkan kembali bahwa individu sebenarnya tidak pernah sepenuhnya bebas. Ia berada dalam ruang-ruang komunitas yang membentuk dan mengarahkan hidupnya. Etzioni menggambarkan hubungan individu dalam komunitas sebagai *I-Thou*, dan bukan *I-It*.¹⁹ Relasi *I-Thou* merupakan relasi yang setara antarindividu. Sementara itu, relasi *I-it* memandang individu lainnya sebagai objek dalam rangka meraih keuntungan. Ikatan antarindividu dalam komunitas tidak hanya menekankan afeksi saja, melainkan juga meliputi nilai-nilai yang dianut bersama dan sasaran-sasaran yang menjadi tujuan komunitas tersebut.²⁰ Nilai dan tujuan bersama tersebut dikenal sebagai budaya moral, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi tradisi bersama dan yang kemudian menjadi nilai yang dianut bersama.²¹

Dari situ terlihat bahwa individu tidak bisa berlaku ataupun diperlakukan merdeka secara mutlak. Ia selalu ada dalam ruang-ruang nilai moral komunitas di mana ia berada. Prinsip liberalisme yang memisahkan keadilan dengan kebaikan, di mana yang boleh dibawa ke ruang publik hanyalah keadilan, sementara itu kebaikan (nilai etis, moral, agama, dsb) dikurung di ruang privat, telah mereduksi keadilan itu sendiri menjadi sebatas *fairness* semata. Liberalisme memberikan peluang yang sama kepada setiap individu untuk meraih jabatan yang diinginkannya, namun hal itu seringkali justru melukai nilai-nilai dalam komunitas tertentu.

Bangkitnya gerakan populisme yang mengatasnamakan agama untuk menyerang Basuki T. Purnama, Gubernur DKI pada waktu itu, dapat dipahami karena telah tercederainya komunitas tertentu oleh kebijakan yang diambil oleh Ahok kala itu. Satu satu contoh, sistem lelang jabatan yang kala itu membuka kesempatan kepada siapa saja asalkan memenuhi kualifikasi untuk bisa menduduki jabatan yang tersedia. Sistem tersebut sangat mungkin akan menguntungkan kelompok minoritas (dalam segi apa saja) untuk bisa meraih jabatan yang selama ini secara tradisi hanya dapat diduduki oleh mayoritas. Di sinilah letak permasalahannya, yaitu meritokrasi telah menyebarkan ancaman bagi komunitas mayoritas. Jabatan atau pekerjaan bagi liberalisme telah direduksi hanya sebatas urusan yang bersifat ekonomis, namun bagi kelompok masyarakat tertentu, pekerjaan memiliki makna yang lebih dalam dari itu, seperti mengandung martabat, makna spiritual, dsb. Pemberian jabatan tidak bisa sekedar mempertimbangkan masalah siapa yang bisa, namun seharusnya

¹⁸ Madung.

¹⁹ Amitai Etzioni, *The Third Way to A Good Society* (London: Demos, 2000), 15.

²⁰ Amitai Etzioni, "The Good Society," *Seattle Journal for Social Justice* 1, no. 1 (2002): 83–96.

²¹ Al Rusmadji, "Berkenalan Dengan Komunitarianisme," *Limen - Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 1, no. 2 April (2005): 30–54, <http://stft-fajartimur.ac.id/jurnal/index.php/lim/article/view/45>.

mempertimbangkan juga bagaimana nilai-nilai yang ada dalam komunitas di mana jabatan tersebut ditawarkan.

Contoh lain bangkitnya populisme sebagai perlawanan terhadap meritokrasi adalah ketika Presiden Jokowi mengangkat Menteri Pendidikan yang bukan berasal dari Muhammadiyah, yang secara tradisi selama ini menduduki jabatan tersebut. Bisa dipahami maksud Presiden Jokowi dari perspektif meritokrasi mungkin menginginkan adanya perubahan (kemajuan) pendidikan dan sekaligus memberikan kesempatan kepada setiap orang dari golongan manapun selama memenuhi kualifikasi untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Namun dampak buruknya adalah, kita dapat merasakan adanya sikap negatif dari para tokoh Muhammadiyah terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Penolakan Prof. Abdul Mu'ti untuk diangkat sebagai Wamendikbud mendapat dukungan luas dari tokoh-tokoh Muhammadiyah dengan argumentasi bahwa tawaran jabatan tersebut adalah penghinaan terhadap Muhammadiyah yang semestinya menduduki jabatan Menteri. Dari sini tergambar jelas bahwa keadilan tidak sekedar urusan *fairness*, yang secara prosedural memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk meraih jabatan yang diinginkan. Keadilan semestinya menyentuk segi substantif (*just*), dan keadilan yang substantif jelas tidak dapat diandaikan sebagai keadilan yang universal. Keadilan yang substantif tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang dihidupi dalam komunitas. Adil bagi satu komunitas tidak selalu berarti sama bagi komunitas lainnya.

Penekanan yang berlebihan terhadap keadilan prosedural dan mengabaikan keadilan yang substantial itulah yang kemudian dapat menjadi pemicu tersulutnya emosi komunitas masyarakat tertentu. Emosi inilah yang kemudian dikapitalisasi oleh pemimpin-pemimpin populis untuk mencapai tujuan politisnya. Bagaimanapun, komunitas tidak dapat dilepaskan dari adanya ikatan emosional di antara anggota-anggotanya, karena emosi itu jugalah yang dapat menjadi basis moral bagi tindakan solidaritas. Namun, emosi juga dapat meruntuhkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Emosi yang negatif, yang terwujud dalam bentuk wacana-wacana kebencian, akan mengisi ruang publik ketika nilai-nilai keadilan dalam komunitas tertentu telah tercederai. Ini juga yang dapat menjadi kritik bagi komunitarian. Komunitarian seringkali berubah menjadi otoritarian. Nilai-nilai moral suatu komunitas yang kemudian dimutlakkan akan menggiring pada bentuk tirani yang lainnya. Emosi yang lebih dikedepankan ketimbang rasionalitas yang kemudian menginstitusionalisasikan tirani tersebut. Hal tersebut dapat tercermin dari adanya ormas-ormas yang berusaha untuk memaksakan nilai-nilai mereka untuk diberlakukan di ruang publik yang sangat pluralistik.

Pentakostalisme dalam Pusaran Populisme

Setelah melihat beberapa fenomena politik Indonesia yang diwarnai dengan emosi negatif, yaitu kebencian, perlu kiranya kita melihat juga bagaimana hal itu tergambar dalam tubuh kekristenan di Indonesia. Dan untuk itu, kelompok Pentakostal dapat menjadi rujukan, oleh karena komunitas Pentakostal selama ini diidentikkan sebagai komunitas yang mengedepankan perasaan (impulsif), terutama dalam praktik peribadatnya. Ekspresi emosional secara terbuka dinyatakan dalam perkumpulan peribadatan, dan bahkan ekspresi-ekspresi tersebut menjadi simbol kesalahan Pentakostal. Untuk menguraikannya, saya memanfaatkan biografi seorang tokoh pergerakan Pentakostal di Swedia, Lewi Pethrus, yang ditulis oleh Joel Halldorf. Tulisan tersebut saya pakai dengan alasan bahwa buku itu satu-satunya yang dapat saya temukan memuat tulisan biografi tokoh dan gerakan Pentakostal secara akademis sehingga layak untuk dijadikan referensi. Sementara untuk konteks Pentakostalisme di Indonesia, saya akan memanfaatkan pengalaman dan pengamatan pribadi sebagai orang yang hidup dalam tradisi Gereja Pentakostal.

Gereja-gereja Pentakostal di Indonesia tidak dapat disangkal mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, melampaui Gereja Protestan atau Katolik yang sudah terlebih dahulu eksis di Indonesia. Gereja Pentakostal seolah memiliki daya tarik tersendiri yang tidak ada di Gereja-gereja arus utama. Terkait fenomena tersebut, pendapat Wonsuk dan Julian Ma sangat layak untuk dipertimbangkan. Menurut mereka, ketertarikan kaum miskin terhadap Pentakostalisme adalah oleh karena dalam kelompok ini kaum miskin dapat menjadi “pemain utama” dalam kehidupan religius.²² Mereka yang sebelumnya berada di pinggiran dan tidak mempunyai suara dalam masyarakat tiba-tiba mendapati dirinya berada dalam pusat hidup keagamaan.²³ Mereka mencontohkan bagaimana Gereja David Yonggi Cho secara revolusioner memobilisasi kaum perempuan awam untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah kultur dominasi pria di Korea Selatan.²⁴ Tradisi yang demikian itu dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap tradisi yang mengunggulkan kualifikasi ekonomi-sosial. Dalam pengalaman maupun pengamatan saya sendiri, kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Gereja-gereja Pentakostal di Indonesia. Sudah sangat biasa bahwa mereka yang menjadi pelayan gerejawi dan bahkan kemudian

²² Wonsuk Ma and Julie C. Ma, “Jesus Christ in Asia: Our Journey with Him as Pentecostal Believers,” *International Review of Mission* 94, no. 375 (October 1, 2005): 493–506, <https://doi.org/10.1111/J.1758-6631.2005.TB00523.X>.

²³ Ma and Ma.

²⁴ Ma and Ma.

memiliki pengaruh besar dalam komunitas adalah mereka yang berlatarbelakang miskin, berpendidikan rendah, dan yang tidak memiliki pengaruh besar dalam masyarakat.

Bukan hanya pada tingkatan jemaat saja, tradisi yang sama juga berlangsung pada *level* pimpinan Gereja Pentakostal. Gereja Pentakostal pada umumnya menganut sistem pemerintahan laikal.²⁵ Dalam pemerintahan laikal, pemerintahan dipegang oleh satu orang Pendeta atau yang dikenal dengan sebutan Gembala Sidang. Kata laikal berasal dari kata *laikos* atau *laos*. Kemudian diterjemahkan menjadi *lay* dalam bahasa Inggris atau awam dalam bahasa Indonesia. Kata *laos* digunakan sebagai antitesa kata *kleros* (penguasa kekaisaran). Dari istilah itu kemudian muncul kata *cleric*, yaitu administrator negeri dan *clergy*, yaitu rohaniwan. *Laos* berarti rakyat biasa yang tidak mengetahui peraturan pemerintah dan tidak mempunyai kuasa, dan dianggap bisa dibodohi oleh para *kleros*. Pada umumnya pendeta Pentakostal memang berasal dari orang awam dalam bidang teologi. Sampai sekarang pun, dari yang saya ketahui, tidak ada satupun Gereja Pentakostal yang menetapkan persyaratan akademik tertentu, misal minimal harus sarjana dalam bidang teologi, untuk dapat diangkat dalam jabatan pendeta.

Tradisi-tradisi tersebut, menurut saya, telah menjadi daya tarik tersendiri yang ditawarkan oleh Gereja-gereja Pentakostal. Tradisi-tradisi tersebut telah menjadi semacam perlawanan terhadap kultur meritokrasi. Individu-individu yang dalam ukuran meritokrasi tersingkirkan oleh karena tidak memiliki kualifikasi yang memadai, malah mendapatkan tempatnya yang terhormat dalam Gereja. Mereka yang sebenarnya tidak memiliki pengetahuan teologis dan Alkitab yang memadai, namun justru menjadi pemimpin bagi ratusan bahkan ribuan orang yang dengan penuh percaya dan kepatuhan mendengarkan apa yang dikhotbahkan. Survey yang dilakukan oleh Bilangan Research Center menunjukkan bahwa 95,2% remaja yang aktif bergereja adalah mereka yang didorong untuk mengikuti pelayanan, sementara yang tidak diikutsertakan dalam pelayanan hanya 72,9% saja yang masih aktif bergereja.²⁶ Gereja-gereja Pentakostal pada umumnya mendorong siapapun, termasuk anak muda, tanpa harus memiliki kualifikasi tertentu, untuk terlibat dalam pelayanan. Keikutsertaan secara aktif dalam pekerjaan pelayanan gerejawi dapat memperkuat ikatan emosional dalam komunitas tersebut.

Ikatan emosional dan loyalitas yang kuat tersebut telah menjadi kultur dalam Gereja Pentakostal. Lewi Pethrus, sebagai pemimpin Gerakan Pentakostal di Swedia, tidak pernah

²⁵ Jairus Hasugian, S. Pantja Djati, and Eddy Simanjuntak, "Pengaruh Pemahaman Rohaniwan Gereja Tentang Model Pemerintahan Gereja Terhadap Ketertiban Gereja," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 7, no. 1 (September 6, 2022): 254–67, <https://doi.org/10.30648/DUN.V7I1.694>.

²⁶ Handi Irawan D. and Cemara A. Putra, "Gereja Sudah Tidak Menarik Bagi Kaum Muda," Bilangan Research Center, accessed May 1, 2023, <https://bilanganresearch.com/gereja-sudah-tidak-menarik-bagi-kaum-muda.html>.

secara resmi menasbihkan dirinya sebagai pimpinan komunitas Pentakostal.²⁷ Ia menciptakan kapital relasinya dengan cara membangun relasi yang kuat dengan pendeta-pendeta yang berada di lapisan akar rumput. Ia sering melakukan perjalanan di berbagai daerah di Swedia dan mengunjungi banyak jemaat lokal. Dalam kunjungannya tersebut, ia sangat jarang menginap di hotel dan lebih banyak di rumah anggota jemaat. Praktik tersebut menciptakan loyalitas dan kedekatan personal. Ia tidak hanya berkunjung untuk berkhotbah tetapi juga memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok dan jemaat yang mengalami tantangan akibat iman Pentakostalnya. Perlu diketahui, komunitas Pentakostal pada saat itu adalah komunitas minoritas di tengah kekristenan Swedia, yang kerap mengalami persekusi, meski bukan secara fisik.

Lewi Pethrus dengan sengaja tidak membuat jabatan-jabatan institusional secara resmi dengan maksud untuk tidak menciptakan kesenjangan relasi karena adanya segregasi jabatan. Setiap individu dalam komunitas Pentakostal dianggap sebagai saudara, dan dipanggil dengan panggilan *brother* atau *sister*, bukan dengan panggilan yang menunjukkan jabatannya. Namun demikian, meskipun tidak ada jabatan-jabatan resmi, fungsi kelembagaan tetap berjalan dengan baik. Ketika ada anggota komunitas yang melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam komunitas tersebut, maka Pethrus akan mengeklusinya secara halus dan nyaris tidak kentara, misal dengan tidak lagi memberikan kesempatan untuk berbicara (berkhotbah) di pertemuan-pertemuan komunitas. Pemecatan secara tidak resmi (tanpa pernah ada surat resmi) tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi pihak yang dipecat tidak merasa dipermalukan dan diumbar aibnya di depan umum. Sementara bagi pihak Pethrus, ia aman dari “serangan balik” apabila muncul ketidakpuasan akibat keputusannya tersebut, karena tidak ada dasar yang dapat dipakai untuk memprotes pemecatan yang tidak resmi dari jabatan yang juga tidak pernah secara resmi ada.

Uraian di atas merefleksikan bagaimana semangat komunitarian, meski tanpa disadari, hidup subur dalam komunitas Pentakostal. Sebagaimana komunitarianisme adalah antitesis terhadap liberalisme, Pentakostalisme juga menganggap liberalisme sebagai musuh utama, paling tidak sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gerakan Pentakostal di Swedia. Prinsip atomisasi individu dalam ruang kebebasan dan pemisahan antara keadilan dengan kebaikan, yang terwujud dalam sekularisasi, merupakan ancaman bagi misi Pentakostal. Untuk alasan

²⁷ Joel Halldorf, *Pentecostal Politics in A Secular World: The Life and Leadership of Lewi Pethrus* (Gewerbestrass: Palgrave Macmillan, 2020), 67-75.

itulah pada akhirnya Pethrus masuk ke dunia politik praktis dengan mendirikan partai politik.²⁸ Ia prihatin dengan makin meluasnya gaya hidup hedonis, bebasnya penjualan minuman keras, dan disingkirkannya Pendidikan Agama Kristen di sekolah-sekolah negeri. Ia menyadari bahwa tidak mungkin mentransformasi masyarakat hanya melalui khotbah di KKR-KKR, apalagi di depan para pemabuk. Transformasi itu hanya bisa dilakukan dari atas, melalui pembuatan undang-undang yang membatasi peredaran minuman keras dan membuka pelajaran Pendidikan Agama Kristen di sekolah-sekolah.

Secara kultural, perjuangan politik Pethrus memang berwarna konservatif, namun pandangan ekonominya bersifat progresif. Ia, melalui partai politiknya, selain mendukung program negara kesejahteraan (*welfare state*) juga memperjuangkan persamaan upah bagi pekerja pria dan wanita. Isu moral-religius diperjuangkan bersama-sama dengan isu ekonomi. Partai politik yang didirikannya juga memperluas aliansinya dengan kelompok minoritas lainnya atau imigran-imigran dari latar belakang apapun untuk bergabung selama memiliki tujuan perjuangan yang sejalan dengan partai politik yang dibentuknya, yaitu menegakkan nilai-nilai Kristiani dalam masyarakat.

Dengan mengangkat isu-isu politik tersebut, tidak dapat disangkal bahwa perjuangan politik Pethrus bersifat populis. Ia memperjuangkan nilai-nilai komunitasnya yang terancam oleh sekularisasi. Lalu bagaimana dengan komunitas Pentakostal di Indonesia? Menurut yang dapat saya tangkap, hal itu tidak jauh berbeda. Nilai-nilai komunitas Pentakostal yang diperjuangkan adalah tentang memenangkan jiwa. Oleh karena itu, isu yang selalu diperjuangkan dan diaspirasikan dalam politik adalah memilih pemimpin yang dapat menjamin kebebasan beribadah (pendirian gereja) dan penginjilan. Isu-isu *social injustice*, seperti korupsi, kemiskinan, diskriminasi (non-agama), dsb, masih belum menjadi perhatian utama yang diperjuangkan melalui politik praktis. Yang diutamakan adalah nilai-nilai dalam komunitas itu sendiri yang telah disebutkan di atas.

Penutup

Bangkitnya gerakan populisme, yang kerap diwarnai dengan emosi yang mengesampingkan rasionalitas, adalah sebagai respon terhadap politik yang dipaksakan untuk sangat rasional. Penempatan orang yang ahli di bidangnya, privatisasi agama dari ruang publik memang adalah upaya yang rasional untuk mencegah konflik dan tirani mayoritas di ruang publik. Namun, hal itu mengingkari hakikat manusia dan mereduksinya hanya menjadi sekedar

²⁸ Halldorf, 213-39.

individu-individu yang hidup dengan motif ekonomi. Menurut saya, untuk menjembatani kedua kutub tersebut, maka pemikiran Habermas tentang tindakan komunikasi patut dipertimbangkan.²⁹ Alih-alih menggunakan tindakan strategis, yang berorientasi pada keberhasilan, konsensus intersubjektiflah yang harus diutamakan dalam hal ini. Tindakan komunikasi ini juga sejalan dengan sila ke-4 Pancasila, yang menekankan musyawarah mufakat. Memang tindakan komunikasi, sebagaimana demokrasi, tidak selalu menghasilkan sesuatu yang ideal. Namun, tindakan komunikasi lebih akan memuaskan semua pihak dan meminimalkan wacana-wacana kebencian memasuki ruang publik.

Daftar Pustaka

- Bruinessen, Martin van. "Traditionalist Muslims and Populism in Indonesia and Turkey." *Tashwirul Afkar* 40, no. 2 (December 29, 2021): 1–27. <https://doi.org/10.51716/TA.V40I2.63>.
- Etzioni, Amitai. "The Good Society." *Seattle Journal for Social Justice* 1, no. 1 (2002): 83–96. ———. *The Third Way to A Good Society*. London: Demos, 2000.
- Halldorf, Joel. *Pentecostal Politic in A Secular World: The Life and Leadership of Lewi Pethrus*. Gewerbestrasse: Palgrave Macmillan, 2020.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang "Negara Hukum" Dan "Ruang Publik" Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2009.
- Hasugian, Jairus, S. Pantja Djati, and Eddy Simanjuntak. "Pengaruh Pemahaman Rohaniwan Gereja Tentang Model Pemerintahan Gereja Terhadap Ketertiban Gereja." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 7, no. 1 (September 6, 2022): 254–67. <https://doi.org/10.30648/DUN.V7I1.694>.
- Irawan D., Handi, and Cemara A. Putra. "Gereja Sudah Tidak Menarik Bagi Kaum Muda." Bilangan Research Center. Accessed May 1, 2023. <https://bilanganresearch.com/gereja-sudah-tidak-menarik-bagi-kaum-muda.html>.
- Ma, Wonsuk, and Julie C. Ma. "Jesus Christ in Asia: Our Journey with Him as Pentecostal Believers." *International Review of Mission* 94, no. 375 (October 1, 2005): 493–506. <https://doi.org/10.1111/J.1758-6631.2005.TB00523.X>.
- Madung, Otto Gusti. "Krisis Demokrasi Dan Tirani Meritokrasi Menurut Michael Sandel." *Jurnal Ledalero* 19, no. 2 (December 19, 2020): 127–44. <https://doi.org/10.31385/JL.V19I2.212.127-144>.
- Nastiti, Aulia, and Sari Ratri. "Emotive Politics: Islamic Organizations and Religious Mobilization in Indonesia." *Contemporary Southeast Asia* 40, no. 2 (2018): 196–221. <https://doi.org/10.1355/cs40-2b>.
- Nozick, Robert. *Anarchy, State, and Utopia*. New York: Basic Books, 2013.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Revised. Massachusetts: The Belknap Press, 1999.

²⁹ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang "Negara Hukum" Dan "Ruang Publik" Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2009), 34-43.

- Rusmadji, Al. "Berkenalan Dengan Komunitarianisme." *Limen - Jurnal Agama Dan Kebudayaan* 1, no. 2 April (2005): 30–54. <http://stft-fajartimur.ac.id/jurnal/index.php/lim/article/view/45>.
- Sandang, Yesaya, and Eko Wijayanto. "Konstruksi Konsep Hak Robert Nozick Dan John Rawls (Sebuah Komparasi Pemikiran)." *Pax Humana: Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma* 4, no. 1 (2017): 5–26.
- Sandel, Michael J. *Liberalism and the Limits of Justice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.